KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sumur minyak terbakar, tertibkan tambang ilegal berbahaya
Tanggal : Minggu, 24 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sumur Minyak Terbakar

Tertibkan Tambang Ilegal Berbahaya

ANGGOTA Komisi XII DPR Syafruddin mendesak Pemerintah menertibkan sumur minyak ilegal, khusus di Blora, Jawa Tengah (Jateng). Hal ini menyusul terbakarnya sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Minggu (17/8/2025).

Praktik pengeboran minyak tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. "Akibat praktik ilegal itu masyarakat menjadi korban, sehingga persoalan ini tidak boleh diremehkan," ujar Syafruddin dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025)

Syafruddin mengingatkan, peristiwa di Blora ini menjadi peringatan keras bahwa aktivitas pengeboran ilegal sangat berisiko tinggi. Pemerintah harus hadir untuk melakukan penertiban, pengawasan, dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Syafruddin berharap, masyarakat tidak tergiur melakukan pengeboran tanpa izin karena berpotensi menimbulkan bencana. Warga yang berminat mengelola potensi minyak bumi di daerahnya harus terlebih dahulu menempuh jalur resmi atau prosedur yang sah dan mengajukan legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jangan sampai karena ingin cepat mendapatkan keuntungan, nyawa dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya," tegas politikus PKB ini.

Untuk itu, Syafruddin mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam menertibkan sumur minyak ilegal di Blora. Apalagi, pelaku penambang sumur minyak ilegal bisa dijerat pidana.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa memiliki kontrak kerja sama. "Bagi yang melanggar pasal ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar rupiah," tegasnya.

Selain itu, ia meminta agar korban dan keluarga yang terdampak mendapatkan perhatian serta bantuan yang layak dari pemerintah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi menyangkut aspek kemanusiaan dan keselamatan publik, sehingga negara harus hadir tidak boleh abai. "Kami menyampaikan rasa dukacita mendalam atas korban jiwa dalam insiden tersebut," kata dia.

Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menilai, kebakaran sumur ilegal di Blora sebagai bukti lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap praktik pengeboran ilegal yang marak di berbagai daerah. Pemerintah harus serius membenahi tata kelola sumur minyak masyarakat.

Pengeboran minyak kata Gunhar, telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, termasuk aspek keselamatan kerja. "Regulasi itu harus ditegakkan agar kejadian tragis seperti di Blora tidak lagi terulang," tegas Gunhar, Sabtu (23/8/2025).

Gunhar mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum yang menjadi backing aktivitas pengeboran ilegal itu. Sebab, praktik serupa tidak hanya terjadi di Blora, tetapi juga di daerah lain.

Dia mencontohkan di Sumatera Selatan (Sumsel) yang sudah puluhan kali mengalami kebakaran sumur minyal ilegal dan menelan korban jiwa. "Kita harus jujur, yang namanya ilegal itu tidak mungkin berani beroperasi tanpa koordinasi dengan oknum aparat penegak hukum," tudingnya.

Oleh karenanya, Gunhar meminta agar kejadian itu harus diusut tuntas, tanpa melihat siapa pun yang membekingi. Jangan sampai masyarakat terus yang menjadi korban.

"Kami menyampaikan rasa prihatin mendalam sekaligus turut berdukacita atas jatuhnya korban jiwa dalam musibah ini," ucap politikus PDIP ini.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng) Taj Yasin Maimoen, menegaskan, pihaknya akan menunda permohonan pengajuan perizinan 4 ribu sumur masyarakat di Blora. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan fokus melakukan verifikasi dan validasi terhadap aktivitas sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora

"Kita menahan semuanya. Kami kaji juga surat-suratnya," kata Taj Yasin di Blora, Jumat (22/8/2025).

Taj Yasin menginstruksikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan verifikasi dan validasi terhadap keberadaan sumur masyarakat. Peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar pemerintah daerah bersama instansi terkait lebih serius dalam melakukan pengawasan.

"Langkah verifikasi sangat penting untuk memastikan legalitas sumur minyak. Aktivitas ilegal sumur minyak dikhawatirkan membahayakan keselamatan masyarakat," kata dia.

Saat ini, kata Taj Yasin, fokus utama Pemprov Jateng adalah memadamkan api di sumur minyak, melakukan evakuasi warga, serta memastikan agar kebakaran tidak merembet ke area lain. "Diperlukan kajian lebih mendalam terkait kandungan gas yang keluar agar tidak membahayakan masyarakat," kata dia.

Sebagai informasi, kebakaran sumur minyak ilegal terjadi di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora terjadi pada Minggu (17/8/2025). Api berkobar ketika sejumlah warga mengambil tumpahan minyak yang menyembur saat sumur dibor. Akibatnya, empat orang tewas dalam kejadian tersebut. ■ TIF